

Pengembangan Collaborative Governance Dalam Rangka Meningkatkan Eksistensi Wisata Lokal di Daerah Baosan Lor, Ngrayun

Imroatus Solikhah¹, Fadhela Fifi Wikaningtyas², Agus Pranoto³, Ekapti Wahjuni Dj^{4*}

¹²³⁴ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

¹²³⁴ Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471

email: iim.solikhah99@gmail.com¹, fadhela1fifi4@gmail.com², agussatak23@gmail.com³, ekapti_wahjuni@umpo.ac.id^{4*}

Abstract

Collaborative governance is a partnership of government institutions for public services. A decision-making approach, collaborative governance, a series of joint activities in which partners mutually generate goals, strategies, share responsibilities and resources. Collaboration is also often said to cover all aspects of decision making, implementation to evaluation. Collaborative governance emphasizes all aspects that have an interest in the policy of making mutual agreements by sharing power. The policy that should be the main focus is to maximize the management of existing natural resources by exploiting and exploring maximally. Existence has an important role in the governance of a region. Especially local tourist areas. In an effort to improve the existence of local tourism, the community needs to collaborate with institutions that have the same vision and mission, in order to create or maintain the existence of local tourism in the region.

Keywords: Collaborative Governance; Existence; Local Tourism

Abstrak

Collaborative governance merupakan kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan, strategi, berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Kolaborasi juga sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan keputusan, implementasi sampai evaluasi., Collaborative governance menekankan semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan membuat persetujuan bersama dengan berbagi kekuatan. Kebijakan yang seharusnya menjadi fokus utama adalah memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam yang ada dengan cara mengeksploitasi dan mengeksplorasi secara maksimal. Eksistensi memiliki peran penting dalam tata kelola suatu daerah. Khususnya daerah wisata lokal. Dalam upaya meningkatkan eksistensi wisata lokal, khususnya di wilayah Ngrayun, dimana kondisi alamnya masih alami dan cocok dijadikan sebagai destinasi wisata alam, masyarakat perlu adanya berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang mempunyai visi dan misi yang sama, guna untuk menciptakan atau mempertahankan eksistensi wisata lokal di daerah.

Keywords: Collaborative Governance; Eksistensi; Wisata Lokal;

*)Penulis Korespondensi

E-mail : ekapti_wahjuni@umpo.ac.id

Pembahasan

Ponorogo merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sebagai lokasi Wisata lokal yang cukup menarik. Kabupaten Ponorogo terletak di wilayah barat Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.371,78 km² yang secara administratif terbagi ke dalam 21 Kecamatan dan 305 desa/ kelurahan. Menurut kondisi geografisnya, Kabupaten Ponorogo terletak antara 111°17' – 111°52' Bujur Timur (BT) dan 7°49' –8°20' Lintang Selatan (LS) dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut yang dibagi menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pudak dan Ngebel dan tujuh belas Kecamatan lainnya merupakan daerah dataran rendah (profil kabupaten Ponorogo, 2017-2021). Banyaknya daerah yang masih hijau dan asri mampu dimaksimalkan dalam pengelolaan sarana prasarana sekaligus fasilitas agar dapat dijadikan sebagai obyek wisata. Karena pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan perubahan yang cukup cepat dalam menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan penghasilan pemerintah dan masyarakat, serta standar hidup untuk meningkatkan sektor-sektor

produktifitas lainnya. Dalam arti lain pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah (Dian Pratama, 2019). Dalam bidang pariwisata inovasi dan kreativitas dalam pengaturan tata kelola sangat diperlukan untuk memaksimalkan hasil akhir yang ditargetkan. Untuk menciptakan hasil akhir yang diinginkan, perlu adanya tata kelola pemerintahan yang dapat menciptakan suatu kerjasama yang dapat menunjang eksistensi wisata lokal di daerah. Eksistensi sendiri adalah proses atau gerak untuk menjadi ada kemudian melakukan suatu hal untuk tetap menjadi ada (Latifah, 2019). Dalam bidang ekonomi khususnya pariwisata, eksistensi dapat didefinisikan sebagai aktivitas pariwisata yang dimaksudkan pada suatu keadaan dimana perkembangannya berusaha kearah yang lebih baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ismayanti (2010) yang mengelompokkan pariwisata menjadi berbagai jenis berdasarkan jenis wisatanya seperti wisata kuliner, wisata budaya, wisata sejarah dan masih banyak lainnya. Pariwisata juga memberikan dampak positif terhadap masyarakat lokal di sekitar destinasi wisata dan pemerintah terutama dalam membuka lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian.

Dalam buku yang berjudul *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan dan Industri Pariwisata* (Sedarmayanti, 2014) mengungkapkan bahwa kepariwisataan Indonesia adalah pariwisata yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Komponen pelaku utama yang menggerakkan roda pembangunan kepariwisataan antara lain pemerintah, dunia usaha atau industri, masyarakat (termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, pers, LSM, dan akademisi). (Ardhia Mafaza, 2020) berisi indikator keberhasilan kolaborasi menurut DeSave yang meliputi : (1) Networked structure, (2) Commitment to a common purpose, (3) Trust among the participants, (4) Governance, (5) Access to authority, (6) Distributive accountability/responsibility, (7) Information sharing, dan (8) Access to resources.

Berdasar perkembangannya, dewasa ini terdapat kecenderungan baru di mana pemerintah dituntut untuk lebih menekankan network baik vertikal maupun horisontal. Model network dalam buku yang berjudul *Governing by network: The New Shape of The Public Sector* yang dikembangkan S. Goldsmith & W.D. bahwa dengan adanya hambatan birokrasi saat ini, semakin mampunya sektor swasta dan non pemerintah, perkembangan teknologi yang pesat dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, maka pemberian pelayanan publik dan pemecahan masalah publik dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan-jaringan yang ada baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini tentu akan mendorong fleksibilitas, desentralisasi, dan inovasi melalui pelibatan banyak pihak sementara pemerintah dapat lebih konsentrasi pada pengembangan misi utamanya. Sedangkan upaya untuk secara terus menerus meningkatkan outcome dan kinerja organisasi dalam melaksanakan tugasnya antara lain dengan mengembangkan pola hubungan antar organisasi baik secara internal maupun eksternal. Bahwa pola hubungan antar organisasi mengalami peningkatan mulai dari koordinasi sampai kepada kolaborasi: "Certainly, the coordinating mechanisms are changing- so are the modes of achieving outcomes. At the risk of gross simplification. I discern move from "command" through "coordination" and "cooperation" to collaboration". Kolaborasi merupakan yang terbaik, di mana kolaborasi menambahkan nilai/ unsur publik untuk proses pemerintahan (governance). Hal tersebut memungkinkan untuk masing-masing aktor memahami model perilaku alternatif dan metode baru lainnya. Ini memberikan keuntungan bersama untuk para aktor, sehingga dapat merangsang pengembangan budaya antar lembaga atau antar organisasi serta membantu menciptakan dan mengelola pengetahuan (Bumiaji and Wisata 2021).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berusaha mengamati dan mengungkap realitas yang terjadi dilapangan terkait dengan pengembangan Kollaboratif Governance Dalam Rangka Meningkatkan Eksistensi Wisata Lokal di Daerah Baosan lor, Ngrayun . Teknik pengumpulan data menggunakan: observasi, wawancara. Sedangkan teknik analisis data dimulai dari: reduksi data, penyajian data, sampai pada verifikasi data dan menarik kesimpulan. Data yang sudah dikumpulkan kemudian akan di uji keabsahan melalui triangulasi sumber (Hilman, Y. A., & Setyaningsih, A. 2022).

Hasil dan Pembahasan

Dalam pengembangan desa wisata ini, Khususnya di daerah Baosan Lor, Kecamatan Ngrayun ini tidak bisa berjalan sendiri, akan tetapi perlu danya kolaborasi dengan beberapa pihak, antara lain dai Pokdarwis sekitar, Masyarakat, Pihak Desa Baosan Lor, Dinas Pertanian, dan Dinas Pariwisata.bentuk kolaborasinya antara lain dengan adanya,

1. Kerjasama Antara Pihak Desa dengan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) Untuk pembangunan yang berkelanjutan serta mengikutsertakan masyarakat
2. Kerjasama pihak Dinas Perhutani dan Pemerintahan Desa untuk perizinan pemanfaatan Sumber daya Alam khususnya Hutan di wilayah Desa Baosan Lor, Ngrayun.
3. Kerjasama deangan pihak Dinas Pariwisata Sebagai sarana Pengenalan daerah Wisata di desa Baosan Lor, Ngrayun

Pembangunan dimulai dari perbaikan Akses jalan menuju lokasi, pembangunan jembatan layak pakai untuk memudahkan wisatawan untk datang, lalu penambahan fasilitas di lokasi seperti spot foto dan tempat kebersihan Washtafel dan kamar mandi.

Ukuran Keberhasilan Kolaborasi dalam Pengembangan Desa Wisata

Keberhasilan kolaborasi yang dilakukan antar stakeholder dalam pengembangan desa wisata melalui Program Balai Ekonomi Desa (Balkondes) dapat dilihat yakni :

- a. Commitment to a Common Purpose
Pihak yang telah melakukan kerjasama sudah memiliki komitmen penuh terhadap program yang telah disepakati an wujudkomitmennya dibuktikan dengan saling bahu mebahai dari para stakeholder untuk mencapai tujuan dari adanya Program Pengembangan Desa Wisata daerah Baosan Lor, Ngrayun.
- b. Trust Among the Participant
Adanya kepercayaan antar phak yang sedang bekerja sama dalam melaksanakn tugasnya masing masing sehingga memaksimalkan program pengembangan desa wsata di daerah Baosan Lor, Ngrayun
- c. Information Sharing
Kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian informasi tersampaikan secara efektif dan efisien. Baik antar stakeholder maupun melalui beberapa kegiatan rutin yang melibatkan seluruh pihak terkait.
- d. Access Resources
Ketersediaan sumber keuangan berjalan dengan baik. memaksimalkan dana yang ada secara maksimal dan tepat sasaran (Ardhia Mafaza, 2020).

Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemaksimalan pengembangan Desa Wisata khususnya Desa Baosan Lor, Ngrayun dapat menggunakan Metode SWOT. Pemerintah desa bersama Pihak terkait yang sudah melakukan Kerjasama juga dapat menjadikan Desa Baosan Lor, Ngrayun sebagai salah satu Destinasi Wisata yang cukup memikat daya tarik dari wisatawan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Beberapa Ukuran keberhasilan yang menjadi tolak ukur pengembangan Desa Wisata Baosan Lor, Ngrayun yaitu: 1). Commitment to a Common Purpose, 2). Trust Among the Participant, 3). Information Sharing, 4). Access Resources.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo atas support dan dukungannya.

Daftar Pustaka

- Ardhia Mafaza, K. S. (2020). Collaborate Governance dalam pengembangan desa wisata . kebijakan publik , 11.
- Cintantya Andhita Dara Kirana, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Dian Pratama, N. A. (2019). Inovasi Pemasaran Melalui Banyuwangi Mall Dalam Upaya Eksistensi Produk Lokal Dengan Sasaran Wisatawan . *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM* , 26-27.
- Hilman, Y. A., & Setyaningsih, A. (2022). The Role of The Village Administration in The Management of Tourist Village in Pacitan Regency. *MAJAPAHIT POLICY*, 2(2).
- Latifah, D. W. (2019). Eksistensi Wisata Pokland dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 9-10.
- Matthoriq. (2021). Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi Pariwisata-Desa "Bumiaji Agrotourism" di Kota Wisata Batu). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*.
- Pamularsih, T. R. (2021). Strategi Pengembangan Potensi Wisata Alam di Desa Abangsongan, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali . 47.
- profil kabupaten Ponorogo. (2017-2021). Retrieved from https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_9a6fa2219c_BAB%20IIBAB%202%20PROFIL%20KAB.pdf: https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_9a6fa2219c_BAB%20IIBAB%202%20PROFIL%20KAB.pdf